

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Surat Keterangan Dokter Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dan Upaya Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Terhadap Terpidana Sakit.

Di dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, surat keterangan dokter dapat dijadikan alat bukti maupun sebagai surat keterangan yang isinya menjelaskan tentang kondisi kesehatan Tersangka, Terdakwa bahkan Terpidana. Pada saat proses persidangan Terdakwa yang dinyatakan sakit berdasarkan surat keterangan dokter dapat dilakukan penundaan persidangan terlebih dahulu dan dilakukan pembantaran terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fpj/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka upaya yang dapat dilakukan Jaksa dalam menghadapi terpidana yang sedang sakit pada saat akan dilakukan eksekusi adalah melakukan pengecekan langsung kondisi terkini kesehatannya dengan dokter ahli dari Kejaksaan (*second opinion*) yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, apabila kondisi terpidana baik segera dilaksanakan eksekusi, apabila sakit keras dan tidak memungkinkan eksekusi maka dengan alasan kemanusiaan untuk ditunda pelaksanaan eksekusinya. Apabila di eksekusi namun pihak Rutan/Lapas tidak mau menerima, maka dibuatkan surat keterangan tidak menerima dari Rutan/Lapas. Dalam hal terjadi penolakan oleh Rutan/Lapas, maka Jaksa dapat melakukan diskresi sebagaimana kewenangan yang dimiliki untuk menunda terlebih dahulu proses eksekusi dengan catatan terpidana dirawat dengan pengawasan tim dokter yang ditunjuk oleh Jaksa. Tetapi, jika dalam pemeriksaan dokter yang ditunjuk Jaksa didapat keadaan yang berbeda tentang kondisi terpidana, maka Jaksa dapat meminta keterangan atau melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah membuat surat keterangan dokter yang digunakan oleh terpidana. Keaslian surat keterangan dokter menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan dapat terjadi surat keterangan dokter palsu, ataupun dokter yang membuat surat keterangan sakit, dalam keadaan intimidasi oleh pihak lain.

Kata Kunci : Surat Keterangan Dokter, Eksekusi Perkara Pidana

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, a conceptual approach. The problems in this thesis are: Doctor's Certificate in the Process of Settlement of Criminal Cases and the Public Prosecutor's Efforts in the Implementation of Criminal Executions of Sick Convicts.

In the Criminal Case Settlement Process, a doctor's certificate can be used as evidence or as a statement which explains the health condition of the suspect, defendant and even the convict. During the trial process, the Defendant who is declared sick based on a doctor's certificate may be adjourned in advance and the defendant is dismissed as regulated in the Criminal Procedure Code. Based on the Technical Instructions for the Handling of Qualified Special Crime Cases Number: B-845/F/Fpj/05/2018 dated May 4, 2018 issued by the Deputy Attorney General for Special Crimes, the efforts that the Prosecutors can take in dealing with convicts who are sick when the execution will be carried out is to directly check the current condition of his health with an expert doctor from the Prosecutor's Office (second opinion) which is stated in a doctor's certificate, if the convict's condition is good, the execution will be carried out immediately, if he is seriously ill and does not allow execution, for humanitarian reasons, the execution will be postponed. the execution. If it is executed but the Detention Center / Prison does not want to accept it, a certificate of not receiving from the Detention Center / Prison is made. In the event of a refusal by the Rutan/Lapas, the Prosecutor may exercise discretion in accordance with his/her authority to postpone the execution process in advance, provided that the convict is treated under the supervision of a team of doctors appointed by the Prosecutor. However, if during the examination of the doctor appointed by the Prosecutor, different conditions are found regarding the condition of the convict, the Prosecutor may request information or conduct an examination of the doctor who has made a doctor's certificate used by the convict. The authenticity of a doctor's certificate is very important, this is because there can be a fake doctor's certificate, or a doctor who makes a sick certificate, in a state of being intimidated by other parties.

Keywords: Doctor's Certificate, Execution of Criminal Cases